

HUBUNGAN KOMUNIKASI POLITIK DENGAN HUKUM TATA NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Hendra Sudrajat

Dua Lima Institute

Email : dualimainstitute@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat dinamis yang ditandai dengan peristiwa hukum ketatanegaraan sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Pada etape keempat sejarah Republik ini berawal dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 masuk ke pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi tahun 1998 telah mengalami gelojak komunikasi politik yang berdampak kepada gelombang demokrasi yang berujung pada reformasi demokrasi dan pemilihan umum. Peristiwa peralihan kekuasaan tersebut, bukan hanya peristiwa politik, melainkan peristiwa hukum tata negara. Dalam ilmu hukum tata Negara terdapat dua struktur ketatanegaraan yakni pertama supra struktur politik yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan alat kelengkapan negara berupa kedudukan, kekuasaan, wewenangnya yang diatur dalam konstitusi negara. Kedua infra struktur politik meliputi lima aspek yakni partai politik, golongan kepentingan atau *interest group*, komunikasi politik, golongan penekan atau *pressure group* dan tokoh politik atau *political figure*. Salah satu infra struktur politik adalah komunikasi politik yang menjadi bagian terpenting dalam mengawal demokrasi melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang salah satu tahapannya adalah kampanye. Relevansi kajian hukum tata negara sebagai bagian ilmu hukum dan kajian ilmu komunikasi sebagai bagian kajian ilmu sosial dan ilmu politik menjadi menarik dikaji baik secara teoritis dan empiris. Dalam kajian teoritis hukum tata Negara memiliki hubungan dengan ilmu sosial dan ilmu politik. Dalam kajian empiris hukum tata Negara memberikan kontribusi keilmuan dalam membangun tatanan berdemokrasi dan berpolitik secara kontitusional, begitupun dengan ilmu komunikasi memberikan kontribusi terhadap membangun pola komunikasi politik yang beretika dan tidak melanggar peraturan perundangan-undangan. Realitasnya kemudian memerlukan pengkajian secara mendalam terhadap relevansi hukum tata negara dengan ilmu komunikasi yang indikatornya dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum memiliki variabel komunikasi politik dalam membangun popularitas dan elaktabilitas dalam memperoleh suara rakyat secara signifikan. Rakyat memiliki peran sentral dalam proses komunikasi politik dalam menerima pesan dalam bentuk janji dan program konstestan pemilihan umum ketika kelak terpilih. Disinilah peran strategis komunikasi politik dalam melahirkan hasil pemilihan umum yang berintegritas dan konstitusional sehingga terjadilah koneksitas antara ilmu komunikasi dengan hukum tata dengan pemilihan umum dalam proses komunikasi politik

Kata Kunci : Komunikasi, Hukum Tata Negara dan Pemilihan Umum

ABSTRACT

The development of the life of the nation is very dynamic which is characterized by the events of the constitutional law since the Unitary State of the Republic of Indonesia established. At the fourth stage in the history of this Republic starting from the Proclamation of Independence August 17, 1945 entered into the government of the Old Order, New Order, to Order Reform in 1998 has undergone fluctuation political

communication that have an impact on the wave of democracy that lead to democratic reform and elections. Phenomenon transition power, not only phenomenom politics, but the law of administrative. In the science of the State there are two structure to administrative sum the first supra political structure that everything to do with the completeness countries in the form of the position, power, his authority set in the state constitution. Both the infrastructure political includes five aspects of the political party, the interest group, communication politics, the pressure group and leaders political or political figure. One of the infrastructure politics is communication political to be the most important part in the escort democracy through the implementation of the general election process is one of his campaign. The relevance of the study of constitutional law as part of legal science and the study of science communication as part of the study of social science and politics become interesting to be studied both theoretically and empirically. In the theoretical study of constitutional law have a relationship with the social sciences and political science. In the study empris constitutional law provides the scientific contribution in building the fabric of political democracy in a constitutional, likewise with the science communication contribute to build a pattern of political communication that is ethical and does not violate laws and regulations. Reality then requires assessment in-depth evaluation of the relevance of constitutional law with the science of communication the indicators in the implementation of elections in Indonesia. General elections have a variable of political communication in building popularity and 'elaktabilitas' in obtaining the voice of the people significantly. People have a central role in the process of political communication in the received message in the appointment form and the program of contestants general election when elected. Here, the role of strategic political communication in the produce election integrity and constitutional so it came to pass connectivity between the science of communication with the law governance with general elections in the process of political communication

Keywords: Political Communication, Contitusal Law, General Election

Latar Belakang

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai pada era reformasi mengalami berbagai perubahan yang ditandai dengan Amandemen Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dimulai dengan Amandemen pertama tahun 1999, Amandemen kedua tahun 2000, Amandemen ketiga tahun 2000, dan Amandemen keempat tahun 2002. Peristiwa hukum ketatanegaraan tersebut diawali dengan reformasi pada tahun 1998 dengan terbukanya kebebasan berdemokrasi yang berimplikasi terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk akses yang terbuka bagi dunia pers yang selama orde baru mengalami keterbatasan ruang gerak. Demokrasi politik disertai dengan perubahan secara signifikan pada berbagai elemen yang berdampak pada berubahnya berbagai regulasi yang membawa perubahan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perubahan tersebut, berimplikasi pada struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Eksistensi hukum tata negara sangat penting bukan hanya secara keilmuan saja, melainkan

dalam kerangka praksis karena mengatur tata organisasi negara atau *het recht dat regelt de staatsorganisatie*. Negara perlu dikelola dan atur sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi kekuasaan yang absolut. Mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut dengan menghadirkan pemerintahan yang demokratis pada kerangka dasar dari, oleh, dan untuk rakyat. Paham kedaulatan rakyat menjadi landasan filosofis dalam bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga hukum tata negara atau *staatsrecht, constitutive law. Droit constitutionnelle* berperan dalam memberikan kontribusi dalam membangun tatanan negara yang kuat dan demokratis.

Dalam peran hukum tata negara perlu memperkuat supra dan infra struktur ketatanegaraan yang menjadi penghubung hukum tata negara dengan disiplin ilmu lainnya. Salah satu infra struktur ketatanegaraan adalah komunikasi politik. Ketika hukum tata negara dikaitkan dengan komunikasi politik, maka hukum tata negara dikaji dalam arti luas yang memiliki sifat dinamis dengan objek kajiannya adalah negara, meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa hukum tata negara yang bersifat *staat in beweging* itu adalah ranah *administrative law* atau *verwaltungsrecht* dalam hal ini hukum administrasi negara, tetapi Peneliti berpandangan lain, bahwa bukan saja hukum tata negara yang bersifat dinamis itu dilihat dari aspek pengambilan keputusan dalam sebuah negara, tetapi berkaitan dengan proses politik dan demokrasi yang mempengaruhi eksistensi hukum tata negara. Politik memiliki peran penting dalam sebuah negara sebagaimana pendapat J. Barent bahwa

Ilmu politik adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari hidupnya negara, selanjutnya dijelaskan bahwa negara merupakan bagian dari hidup kemasyarakatan di suatu tempat, dan bahwa oleh ilmu politik diselidiki bekerjanya negara di tengah-tengah masyarakat itu.

Hadirnya komunikasi politik memiliki keterkaitan erat dengan hukum tata negara dikaji dalam aspek penerapan asas-asas hukum tata negara yang bersifat universal. Dalam konteks universalitas hukum tata negara yang tidak hanya mengkaji secara hukum positif, tetapi mengembangkan secara empiris diluar kajian dogmatik hukum, sehingga kajian ilmu komunikasi dalam hal komunikasi politik menjadi relevan untuk dikoneksitaskan dalam ranah empiris dalam perhelatan proses demokrasi yakni pemilihan umum, karena dalam pemilihan umum ada tahapan pemilihan umum yakni kampanye, meskipun sesungguhnya bukan hanya dalam kampanye saja terjadi proses komunikasi politik, tetapi setiap politisi

atau komunikator politik telah melakukan komunikasi politik diluar tahapan kampanye pemilihan umum, dan hal itu terjadi sejak partai politik ada dan seseorang menjadi politisi.

Sub Topik

Dalam pembahasan hubungan komunikasi politik dengan hukum tata negara dalam kampanye pemilihan umum dirumuskan sub topik yakni “Hubungan Komunikasi Politik Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum” dengan mengkaji secara nomatif keterkaitan komunikasi politik dengan hukum tata negara dalam kampanye pemilihan umum, begitupun mengkaji peran komunikasi politik dalam kampanye untuk mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Sub topik ini bertujuan untuk mengetahui hubungan komunikasi politik dengan hukum tata negara secara teoritis dalam praktek kampanye pemilihan umum baik pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu bertujuan untuk mengetahui peran komunikasi politik dalam kampanye untuk mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil pada tahapan kampanye pemilihan umum. Disamping tujuan, maka sub topik memberikan manfaat dalam memberikan gambaran secara teoritis dan praktis terhadap hubungan komunikasi politik dengan hukum tata negara dalam penyelenggaraan kampanye pemilihan umum baik di pemilihan umum Presiden, legislatif maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga tulisan dalam bentuk karya ilmiah ini memberikan kontribusi keilmuan dalam praktek komunikasi politik yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemilihan umum pada tahapan kampanye. Manfaat tersebut akan dijadikan rujukan akademis dalam membangun performa secara konkrit dalam mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas, karena pemilihan umum bagian dari hukum tata negara.

Pembahasan

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Komunikasi Politik

Eksistensi hukum tata negara sebagai bagian dari ilmu hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu. Keterkaitan antara beberapa disiplin ilmu sangat penting dikaji secara ilmiah, karena untuk memperjelas kedudukan dan pengkajian masing-masing ilmu serta mengurai secara keilmuan dengan berbagai keterkaitannya. Prof.Dr. Jimly Assidique,S.H. mengemukakan kedudukan hukum tata negara yang memiliki keterkaitan dengan ilmu lainnya seperti ilmu komunikasi yang

berawal dari ilmu politik yang diuraikan dalam bentuk ilustrasi sebagai berikut (Assidiqie, 2006).

Ibarat tubuh manusia, maka ilmu hukum tata Negara diumpamakan oleh Barent sebagai kerangka tulang belulang, sedang ilmu politik ibarat daging-daging yang melekat di sekitarnya atau *het ulees er omheen beziet*. Oleh karena itu, untuk mempelajari hukum tata Negara, terlebih dahulu kita memerlukan ilmu politik, sebagai pengantar untuk mengetahui apa yang ada dibalik daging-daging di sekitar kerangka tubuh manusia yang hendak diteliti. Dalam hal ini, Negara sebagai objek studi hukum tata Negara dan ilmu politik juga dapat diibaratkan sebagai tubuh manusia yang terdiri dari daging dan tulang.

Kedudukan ilmu politik sangat penting dalam mengurai hubungan komunikasi politik dengan hukum tata negara, karena ilmu politik atau *wetenschap der politiek* lebih luas dibandingkan dengan ilmu hukum, sehingga dalam kajian ilmu komunikasi, politik secara keilmuan ditempatkan sebagai *political science* yang lebih menekankan pada aspek sosial politik yang berkembang dalam suatu negara. Komunikasi politik bagian dari ilmu komunikasi yang secara umum komunikasi politik dapat diartikan sebagai proses yang memiliki implikasi dan konsekuensi terhadap berbagai aktifitas politik memiliki pesan politik seperti meyakinkan pemilih dalam kampanye pemilihan umum.

Bilamana dikaji eksistensi Ilmu komunikasi, maka definisi ilmu komunikasi berasal dari bahasa latin yakni *communico* yang berarti membagi, serta arti lainnya yakni *communis* yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Membangun kebersamaan mengandung makna bahwa komunikasi mengandung dimensi persatuan melalui media komunikasi, karena dengan melakukan komunikasi baik secara verbal maupun non verbal akan tercipta hubungan interkoneksi antar sesama manusia untuk saling memenuhi kepentingan secara manusiawi. Dalam ilmu politik terdapat berbagai kepentingan untuk mencapai kekuasaan yang memerlukan ilmu komunikasi, sehingga hal ini menjadi pijakan teoritis untuk mengkaitkan dengan hukum tata negara, karena dalam objek kajian struktur ketatanegaraan yakni supra struktur politik yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan alat kelengkapan negara berupa kedudukan, kekuasaan, organisasi negara dalam bentuk lembaga negara beserta wewenangnya yang diatur dalam konstitusi negara. Kedua infra struktur politik meliputi lima aspek yakni partai politik, golongan kepentingan atau *interest group*, alat komunikasi politik, golongan penekan atau *pressure group* dan tokoh politik atau *political figure*.

Salah satu struktur ketatanegaraan yakni infra struktur politik adalah komunikasi politik yang memiliki keterkaitan dengan ilmu komunikasi. Eksistensi dari komunikasi politik sebagai bagian dari struktur ketatanegaraan memiliki peran strategis dalam membangun sebuah tatanan demokrasi yang berkualitas, karena salah satu implementasi demokrasi yang berkualitas adalah terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas yang ditandai dengan proses komunikasi politik yang santun dan penuh dengan etika. Komunikasi politik yang baik terukur dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum baik pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ketiga jenis pemilihan umum tersebut, untuk mengisi dua lembaga Negara yakni posisi Presiden dan Wakil Presiden dan Mengisi Posisi jabatan di Lembaga Perwakilan Rakyat di Pusat dan Daerah. Selain itu untuk mengisi posisi jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota beserta Wakilnya. Ketiga jenis pemilihan umum tersebut memerlukan komunikasi politik dalam mencapai target kekuasaan yang akan diraihinya. Komunikasi politik atau *political communication* menjadi variabel penting dalam proses pemilihan umum, karena terjadi komunikasi dua arah yang melibatkan aktor politik maupun politisi yang substansi komunikasinya adalah pesan-pesan politik kepada publik dalam hal ini konstituen atau rakyat. Menurut Prof. Dr. Hafied Cangara mengemukakan bahwa komunikasi politik adalah sebuah studi yang interdisiplinari yang dibangun atas berbagai macam disiplin ilmu, terutama dengan hubungannya antara komunikasi dan proses politik (Cangara, 2009).

Kedudukan komunikasi politik yang memiliki hubungan dengan proses politik termasuk pemilihan umum, karena dalam pemilihan umum dengan kegiatan kampanye memuat pesan politik berkaitan dengan isu kebijakan pemerintahan dan kekuasaan dalam hal *the essence of politic is power*. Komunikasi politik sebagai sebuah ilmu terapan yang secara praksis melibatkan yang diperintah dan yang memerintah dalam konteks pemilihan umum melibatkan Calon Pemimpin dengan rakyat sebagai konstituen. Dalam komunikasi politik melibatkan personalitas yang terjalin dua arah dengan beberapa komunikator politik. Dalam hal ini komunikator politik adalah orang yang terlibat dalam komunikasi politik yang menyampaikan pesan-pesan politik untuk mencapai kepentingan kekuasaan. Salah satunya contohnya dalam pemilihan umum misalnya, dalam prosesnya selain politisi yang menjadi peserta pemilu menjadi komunikator politik, juga terdapat juru kampanye yang berasal dari fungsionaris partai politik maupun relawan dapat bertindak sebagai

komunikator politik dalam memasarkan program dan janji politik dalam kampanye. Dalam komunikasi politik bagi Penulis terdapat beberapa jenis yang merupakan rangkaian dari proses komunikasi politik. Dalam komunikasi politik terdapat beberapa saluran komunikasi yakni komunikasi massa, komunikasi tata muka, komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi. Pada perspektif komunikasi politik seorang komunikator dalam kampanye dalam pemilihan umum bertindak sebagai seorang *sender* atau pengirim pesan terhadap khalayak dalam hal ini kepada konstituen untuk mengkomunikasikan pesan-pesan politik, kemudian melakukan *Encoding* melalui proses penyusunan ide yang menjadi simbol atau pesan, biasanya dalam kampanye menggunakan *tagline politik* seperti “Berubah Untuk Maju”. Dalam perhelatan pemilihan umum *encoding* seringkali digunakan oleh Para Politisi untuk membuat simbolisasi politik sebagai bagian dari strategi kampaenya. Proses selanjutnya *message* atau pesan, media saluran, *decoding* merupakan proses pemecahan atau penerjemahan simbol-simbol, komunikasi atau *receiver* atau penerima pesan- konstituen dan *feed back* atau umpan balik sebagai suatu respon. Keberhasilan komunikasi politik dalam kampanye menurut Penulis yakni pada kemampuan komunikasi Para Politisi sebagai Komunikator Politik pada tahapan *feed back* atau umpan balik yang diberikan oleh konstituen dalam bentuk memberikan suaranya pada bilik suara pada pelaksanaan pemilihan umum.

Partisipasi Media dan Partisipasi Politik serta Asas Pemilihan Umum

Komunikasi politik sangat identik dengan partisipasi politik, dan dalam kajian partisipasi politik berada pada ranah pengkajian pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum mengantarkan rakyat ke tahta kekuasaannya, karena hakikat kedaulatan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi modern adalah berada di tangan rakyat. Partisipasi politik adalah salah satu tujuan komunikasi politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Roni Tabroni (2012).

Dalam sistem demokrasi partisipasi merupakan aspek yang sangat vital. Masyarakat atau public adalah pemberi saham terhadap republik ini. Publiklah yang akan menentukan nasib bangsa, termasuk nasib dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap Pejabat atau Wakil Rakyat seringkali menyebut rakyat auat mengklaim rakyat ketika berbicara atau membuat kebijakan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat sebagai warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi kehidupannya.

Urgensi partisipasi politik sangat penting dalam sebuah negara, karena akan menentukan nasib kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi tingkat partisipasi politik rakyat tidak hanya diukur dalam pemilihan umum, tetapi melalui proses pelibatan rakyat dalam mengambil keputusan, mendirikan partai politik dan menyuarakan aspirasinya melalui media baik cetak maupun elektronik. Partisipasi politik melalui pemilihan umum dan media sangat erat kaitannya, sebagaimana pembahasan sebelumnya komunikasi politik melalui salah satu saluran informasinya adalah media dalam memperlancar penyampaian pesan-pesan politik dalam kampanye pemilihan umum. Keterkaitan ini sesuai dengan pendapat Daniel Lerner dalam bukunya yang sangat monumental yakni *the passing tradisional society*. Daniet mengemukakan bahwa.

Pers dan media berperan dalam peralihan masyarakat tradisonal ke masyarakat modern. Proses peralihan menuju modernisasi ditandai dengan lima faktor utama yakni: tingkat urbanisasi, melek huruf, partisipasi media, partisipasi politik dan tingkat empati masyarakat

Lerner menyebut partisipasi media dan partisipasi politik merupakan satu keterkaitan yang saling menguatkan dalam proses peralihan ke masyarakat modern. Media berkontribusi untuk melakukan perubahan dengan berperan menghadirkan komunikasi yang beretika, profesionalitas, dan independen. Dengan posisi media yang ideal tersebut, maka akan memperkokoh partisipasi politik masyarakat yang mencerahkan dan mencerdaskan dalam pemilihan umum berdasarkan asas-asas pemilihan umum. Media hadir dalam proses pemilihan umum memberikan informasi ke masyarakat yang mendidik dan peran media tidak berpihak sebagai komunikator politik salah satu partai politik atau kelompok kepentingan lainnya. Penulis mengkaji terhadap independensi media dalam perspektif komunikasi media dengan hadirnya beberapa Pemilik Media Nasional yang mendirikan partai politik seperti Pemilik Media Group (Metro TV, Media Indonesia) Surya Paloh dengan mendirikan Partai Nasional Demokrat. Abu Rizal Bakrie Partai Golkar Pemilik TV One. Hary Tanoesoedibyo (Pemilik MNC Group (RCTI, MNC TV, dan Global TV) denga Partai Perindo. Grace natalie (Mantan Jurnalis dan Presenter TV) ketua umum partai solidaritas Indonesia. Ahmad Ridha Sabana (Direktur Televisi Pendidikan Indonesia) Ketua Umum Partai Garuda, sebagai dalam gambar sumber detik.com di bawah ini :

4 PARTAI BARU PESERTA PEMILU 2019

PARTAI PERINDO
PENDIRI Hary Tanoesoedibyo Pengusaha media

- Sejak awal partai ini kerap mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
- Pada pertengahan 2017 Hary Tanoesoedibyo menyatakan Perindo akan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.
- Editorial dan tampilan berita-berita di Koran Sindo pun tak lagi galak ke pemerintah.
- Perindo hampir setiap saat tampil di media Grup MNC

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
KETUA UMUM Grace Natalie Eks jurnalis dan presenter tv

- Pengurus umumnya kaum muda berlatar jurnalis, aktivis, wirausaha, hingga mahasiswa.
- Biasa saling sapa "bro" dan "sis" dan aktif bergerak di media sosial
- Menggalang dana dari publik dengan mengeluarkan Kartu Sakti (Solidaritas Antikorupsi dan Intoleransi)
- Mendapatkan sokongan dari sejumlah pengusaha menengah

PARTAI GARUDA
KETUA UMUM Ahmad Ridha Sabana Mantan Direktur TPI

- Partai Gerakan Perubahan Indonesia dideklarasikan, 16 April 2015.
- Tak ada tokoh yang dikenal publik di partai ini. Deklarasinya pun senyap dari liputan media.
- Ketua umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana adalah mantan Direktur PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Dia juga mantan Caleg Gerindra, dan adik politisi Gerindra, Ariza Patria.

PARTAI BERKARYA
PENGGAGAS Tommy Soeharto Pengusaha

- Selain beberapa mantan politisi Golkar, mantan Danjen Kopassus Muchdi PR turut menjadi pengurus inti.
- Muchdi pernah bersama Prabowo mendirikan Gerindra, dan masuk PPP.
- Menjadikan sosok Soeharto sebagai roh partai

NASKAH: SUDRAJAT | SUMBER: DETIKCOM | INFOGRAFIS: FUAD HASIM

Sumber Detik.Com

Fakta di atas menunjukkan bahwa komunikasi politik memberikan kontribusi terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum. Para Pemilik Media serta Tokoh yang pernah bergelut di media terjun ke dunia politik untuk menjadi pengurus partai politik. Hasil pengamatan dan analisis Penulis kondisi tersebut disebabkan karena selain kemampuan jaringan sosial dan kekuatan kapital/modal, juga ditunjang oleh potensi komunikasi politik yang hebat. Terbukti dari 14 partai politik yang lolos sebagai peserta pemilihan umum legislatif tahun 2019, terdapat 3 partai politik baru yang memiliki rekam jejak dari kalangan Tokoh Media, selain 2 partai lama. Hal ini menguatkan teori Lerner tadi yang membahas perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat modern melalui partisipasi media dan partisipasi politik.

Implementasi dalam tataran demokrasi Indonesia dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tentunya bukan hanya sekedar relevansi ilmu komunikasi dengan hukum tata negara yang dikaji dalam komunikasi politik dalam pemilihan umum saja, melainkan bagaimana mampu menciptakan pemilihan umum sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Partisipasi media dalam berpartai politik bagi para Tokohnya selayaknya tidak hanya sekedar mengejar kekuasaan dan legitimasi politik saja.

Partisipasi Media dan Politik hendaknya mampu membangun budaya politik yang berintegritas yang indikatornya berada pada asas pemilihan umum.

Dalam asas pemilihan umum yakni langsung, dimana masyarakat turut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dengan ikut serta memberikan hak suaranya. Asas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sesungguhnya merupakan wujud nyata partisipasi politik yang dalam kajian ilmu komunikasi berada dalam teori aliran kritis yang salah satunya dikemukakan oleh Muhammad Mufid yakni *discourse of suspicion*

Mendobrak struktur komunikasi dan struktur sosial yang mempengaruhi pola komunikasi suatu masyarakat

Perilaku pemilih dalam komunikasi politik dipengaruhi oleh struktur komunikasi masyarakat yang ditandai dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Sejalan dengan bergesernya era orde baru ke orde reformasi, maka partisipasi politik masyarakat juga berubah dari wajib pilih ke hak pilih. Esensi hak pilih memberikan ruang secara umum bagi seluruh masyarakat untuk memberikan hak pilihnya sesuai syarat pemilih dalam peraturan perundang-undangan, begitupun bebas tanpa ada intervensi dalam memilih salah satu Calon dan Partai Politik, serta rahasia dimana, pemilih dijamin kerahasiaan dalam memberikan partisipasi politiknya dalam pemilihan umum. Struktur komunikasi juga mempengaruhi asas pemilihan umum yang jujur dan adil, dimana penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini komisi pemilihan umum yang ada di pusat dan di daerah harus menghadirkan profesionalitas dan integritas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil.

Dalam struktur sosial dalam proses komunikasi politik dilihat dari aspek etnis, bahasa, norma sosial. Dalam kampanye dalam kajian komunikasi politik tidak boleh membawa isu sara yang dapat memecah belah integritas bangsa, kampanye pemilihan umum harus berkontribusi positif sebagai pemersatu bangsa dalam menciptakan konsensus kebangsaan bersama yang bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Selain itu struktur sosial mampu menghadirkan realisasi sikap etika politik dalam kampanye pemilihan umum yang menjunjung tinggi norma sosial dengan tidak saling menghujat dan mencaci maki dalam kampanye pemilihan umum.

Kesimpulan

Berdasarkan dengan pembahasan terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa disiplin ilmu hukum tata negara memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu komunikasi melalui infra struktur politik yang merupakan salah satu pilar hukum tata negara yakni komunikasi politik yang menjadi bagian terpenting dalam mengawal demokrasi melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang salah satu tahapannya adalah kampanye, disinilah letak relevansi kajian hukum tata negara sebagai bagian ilmu hukum dan kajian ilmu komunikasi sebagai bagian kajian ilmu sosial dan ilmu politik. Dalam kesimpulan dirumuskan rekomendasi akademik sebagai berikut pertama guna kepentingan pengembangan keilmuan diperlukan penulisan buku tentang “Konstitusi Komunikasi” yang Peneliti persiapkan saat ini, semoga bisa menjadi buku rujukan akademik untuk mengkaji secara mendalam tentang komunikasi politik dalam perspektif konstitusi yang merupakan salah satu bagian kajian hukum tata negara, kedua perlunya dilaksanakan *Forum Group Discussion* atau FGD antar lintas ilmu baik ilmu komunikasi dan hukum tata negara yang ke depannya bisa dikembangkan dalam bentuk seminar, lokakarya, bahkan dalam bentuk kegiatan *proceeding* untuk peningkatan kapasitas keilmuan hukum ata negara dan ilmu komunikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I. G. P., & Na'a, S. (2009). Memahami ilmu negara dan teori Negara. Rafika Aditama: Bandung.
- Assidiqie, Jimly. 2006. Pengantar Hukum Tata Negara. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2009. Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi. Rajawali Pers: Jakarta.
- Detik.com
- Mufid, Muhammad. 2015. Etika dan Filsafat Komunikasi. Prenadamedia Group: Jakarta
- Sumadiria, A.S. Haris. 2016. Hukum dan Etika Media Massa. Panduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber. Simbiosis Rekatama Media: Bandung.
- Tabroni, Roni. 2012. Komunikasi Politik Pada Era Multi Media. Simbiosis Rekatama Media: Bandung.